

TUGAS AKHIR

MANFAAT SENSUS PAJAK NASIONAL (SPN) TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada
Program studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau*

Disusun Oleh :

MUHAMMAD SOBIRIN

NIM. 01076103776



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2013**

ABSTRAK

MANFAAT SENSUS PAJAK NASIONAL (SPN) TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI

Oleh :

**MUHAMMAD SOBIRIN
NIM. 01076103776**

Penelitian ini dilakukan di Kota Madya Dumai yang berlangsung dari bulan februari sampai mei 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Sensus Pajak Nasional memiliki manfaat terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak, sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Sensus Pajak Nasional.

Hasil dari penelitian berdasarkan observasi dan wawancara yakni mengetahui manfaat sensus pajak nasional terhadap peningkatan jumlah wajib pajak. Menyadari masih sedikitnya jumlah pembayar pajak, maka pemerintah akan melaksanakan kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional. Kegiatan ini diharapkan semua Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya dan lebih meningkatkan kedisiplinan di bidang perpajakan. Semua kendala itu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi masyarakat yang taat pajak. Masyarakat dan wajib pajak beranggapan bahwa mengurus segala sesuatu tentang pajak sangat membingungkan, itu dikarenakan minimnya pengetahuan tentang perpajakan.

Kata kunci: *Sensus, Pajak dan Wajib Pajak*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat limpahan hidayat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Selawat berangkai salam kepada kekasih Allah SWT, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan besar pada peradaban manusia saat ini.

Syukur alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul ***Manfaat Sensus Pajak Nasional (SPN) Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai***, Adapun tujuan dari penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Muda Pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis mengalami berbagai kesulitan, akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan laporan ini sebagaimana semestinya. Pada kesempatan ini secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebagai penghargaan dan rasa cinta yang paling tulus kepada Bapak dan Ibu tercinta, yang penulis sayangi yang

selalu mendoakan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh terhadap agama, berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara.

Dalam hal ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, pada kesempatan sekarang ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Purek I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Mahendra Romus, S.P., M.Ec., PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial beserta Pudek I, II, dan III yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Mahmuzar, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Diploma III Administarsi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Putriana, SE, MM, selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan bimbingan, motivasi dan masukan yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriah, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir Ini.

6. Ibu Hesty Wulandari, SE, M.Si, Ak, selaku kepala Lab di jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Cecep Supriadi selaku kasubag.umum, Bapak Prameswara Bratha Sanjaya selaku Pelaksana Seksi Pelayanan, Bapak Gunawan selaku Pelaksana Seksi Pengolahan dan Informasi dan seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai yang telah membantu penulis dalam penulisan Tugas Akhir.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Untuk teman-teman di Administrasi Perpajakan angkatan 2010 serta adik-adik kelas, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga kelak kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan kita semua menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, amin ya rabbal 'alamin...

Wassalamu`alaikum Wr,Wb

Pekanbaru, 16 Mei 2013
Penulis

Muhammad Sobirin
NIM. 01076103776

DAFTAR ISI

ABSTARK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. latar belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.4. Metode penulisan	6
1.5. Sistematika penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM.....	9
2.1. Sejarah singkat KPP Pratama Dumai.....	9
2.2. Visi dan Misi.....	10
2.3. Sturktur Organisasi KPP Pratama Dumai.....	10

2.4. Uraian Tugas KPP Pratama Dumai.....	11
2.5. Bagan/Unit Kerja KPP Pratama Dumai.....	13
2.6. Wilayah Kerja KPP Pratama Dumai.....	16
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	17
3.1. Tinjauan Teori	17
3.1.1. Pengertian Pajak.....	17
3.1.2. Fungsi Pajak	18
3.1.3. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	19
3.1.4. Syarat Pemungutan Pajak.....	20
3.1.5. Asas Pemungutan Pajak.....	21
3.1.6. Sistem Pemungutan Pajak.....	22
3.1.7. Sensus Pajak Nasional.....	23
3.1.7.1. Pengertian Sensus Pajak Nasional.....	23
3.1.7.2. Dasar Hukum Sensus Pajak Nasional.....	24
3.1.7.3. Subjek Sensus Pajak Nasional.....	27
3.1.7.4. Objek Sensus Pajak Nasional.....	28

3.1.7.5. Manfaat Sensus Pajak Nasional.....	28
3.1.7.6. Pandangan Pajak Dalam Islam.....	29
3.2. Tinjauan Praktek.....	32
3.2.1. Data Jumlah Wajib Pajak Pada KPP Pratama Dumai.....	33
3.2.2. Mekanisme Sensus Pajak Nasional.....	34
3.2.3. Pihak Yang Terkait Dalam Sensus Pajak Nasional.....	37
3.2.4. Kerahasiaan Data Sensus Pajak Nasional.....	37
BAB IV PENUTUP.....	38
4.1. Kesimpulan.....	38
4.2. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Struktur Oraganisasi KPP Pratama Dumai.....	11
Gambar III.1. Mekanisme Sensus Pajak Nasional KPP Pratama Dumai...	36

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Perkembangan jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Dumai dari tahun 2008 s/d 2012..... 3

Tabel III.1. Data wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai dari

tahun 2008 s/d 2012..... 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Roda pembangunan nasional dapat terus bergerak dan perekonomian negara dapat terus tumbuh karena adanya penerimaan negara. Semakin besar penerimaan negara tentu akan semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Penerimaan negara dapat ditingkatkan jika ada perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak tersebut dapat diwujudkan jika terdapat data yang akurat mengenai potensi pajak, untuk membiyai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Itulah mengapa Sensus Pajak Nasional (SPN) sangat diperlukan agar keadilan dan kesejahteraan rakyat terwujud melalui penggunaan uang pajak.

Sensus Pajak Nasional (SPN) adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukum pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 september tentang Sensus Pajak Nasional (SPN).

Saat ini diketahui sedikit sekali Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dari puluhan juta orang Indonesia yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya 8,5 juta yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010. Begitu pun dengan badan usaha. Dari belasan juta yang terdaftar, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajaknya.

Menyadari masih sedikitnya jumlah pembayar pajak, maka pemerintah akan melaksanakan kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional. Dengan kegiatan ini diharapkan semua orang atau badan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya.

Tabel 1.1
Perkembangan jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Dumai dari tahun 2008 s/d 2012

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2008	27.939
2	2009	55.553
3	2010	66.533
4	2011	68.586
5	2012	82.326

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

Dari tabel diatas terlihat dalam pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional memiliki dampak besar terhadap penambahan jumlah wajib pajak dari tahun 2008 s/d 2012 yaitu pada tahun 2008 jumlah wajib pajak sebesar 27.939, di tahun 2009 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak sebesar 27.614, jumlah wajib pajak di tahun 2010 meningkat sebesar 10.980, sedangkan pada tahun 2011 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dengan dimulainya program Sensus Pajak Nasional yaitu sebesar 2.053, dan pada tahun 2012 jumlah wajib pajak meningkat sebesar 13.740. Dengan adanya Sensus Pajak Nasional jumlah wajib pajak akan terus bertambah maka pendapatan dari sektor pajakpun bertambah. Pemerintah akan melaksanakan perencanaan pembangunan, kesehatan, dan pendidikan tentu dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus

dibayar oleh seluruh Wajib Pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Setiap tahun, Wajib Pajak wajib menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Sedangkan sarana untuk menyetor pajak ke bank atau kantor pos digunakan formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP). Setiap warga Negara Indonesia yang telah berpenghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib untuk membayar pajak. Setiap badan usaha wajib terdaftar sebagai Wajib Pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan perpajakan. Disamping ketentuan yang mengatur tentang kewajiban perpajakan yang harus di jalankan oleh wajib pajak, pemerintah juga membuat ketentuan yang mengatur tentang hak yang dapat diterima wajib pajak. Hak tersebut antara lain wajib pajak berhak mengajukan keberatan, banding, peninjauan kembali, gugatan, imbalan bunga, kepastian SPT lebih bayar dalam proses restitusi, dan lain-lain.

Sensus Pajak Nasional pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Sungguh tidak adil apabila ada sebagian masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih banyak lagi yang belum membayar pajak. Masyarakat haruslah memiliki rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan seluruh masyarakat bisa

mewujudkan rasa bangga bayar pajak dan lebih meningkatkan kedisiplinan di bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan yang nantinya akan di tuangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul : **“Manfaat Sensus Pajak Nasional (SPN) Terhadap Penigkatan Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai”**.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang dapat penulis sampaikan yaitu “Apakah Sensus Pajak Nasional (SPN) memiliki manfaat terhadap peningkatan jumlah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai ? “.

I.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.3.1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian adalah untuk mengetahui manfaat Sensus Pajak Nasional (SPN) terhadap peningkatan jumlah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai.

I.3.2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu :

- a. Sebagai sumber informasi dan pedoman bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Sebagai sarana dan media untuk menambah wawasan penulis dalam masalah Sensus Pajak Nasional (SPN).
- c. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi para pegawai dan staf pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai.
- d. Sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang.

I.4. Metode Penulisan

I.4.1. Tempat

Penulisan ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai yang beralamat di Jl.Sultan Syarif Kasim No 18 Kota Dumai Telp.(0765) 34229 - 34582, Fax. (0765) 34230.

I.4.2. Waktu

Penulisan ini direncanakan pada bulan Maret s/d Mei 2013

I.4.3. Jenis Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staf KPP Pratama Dumai terutama

kepala seksi ekstensifikasi dan kepala seksi pengolahan data dan informasi (PDI) yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang penulis peroleh dalam bentuk laporan, cacatan, buku-buku, dan dokumen yang terkait melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai.

I.4.4. Metode Pengumpulan Data

1.4.4.1. Observasi

Yaitu penulis mengamati secara langsung ke lapangan dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.4.4.2. Interview

Untuk pengumpulan data penulis mengajukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staff kantor pelayanan pajak (KPP) pratama dumai khususnya kepada kepala seksi ekstensifikasi dan kepala seksi pengolahan data dan informasi (PDI) yang di anggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diperlukan penulis.

I.4.5. Analisis Data

Setelah data-data yang sudah di kumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan

pendekatan deskriptif, yaitu menggunakan data-data dan keterangan yang di peroleh untuk di paparkan dan dianalisa.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematis merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam penulisan. Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA DUMAI

Dalam bab ini penulis menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai, uraian tugas, struktur organisasi unit kerja dan uraian tugas pokok dan fungsinya.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisikan pembahasan pengertian pajak, pengelompokan pajak, pengertian Sensus Pajak Nasional (SPN), dasar hukum Sensus Pajak Nasional (SPN), mekanisme Sensus Pajak Nasional (SPN), subjek Sensus Pajak Nasional (SPN), objek Sensus Pajak Nasional (SPN), dan manfaat Sensus Pajak Nasional (SPN).

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang di temukan, kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KPP PARATAMA DUMAI

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

Kantor Pelayanan Pajak Dumai didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/KMK-01/1994 tanggal 29 maret 1994, dengan wilayah kerja sebagai berikut :

1. Kabupaten Siak
2. Kabupaten Bengkalis
3. Kabupaten Rokan Hilir
4. Kota Madya Dumai

Seiring dengan perkembangan kota dan wilayah, pada tanggal 27 Mei 2008, Kantor Pelayanan Pajak Dumai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Hal ini di tandai dengan reformasi di bidang peraturan undang-undangan dengan menerapkan *self assessment system* serta perubahan struktur oraganisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak , dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.2. Visi dan Misi direktorat jenderal pajak (DJP)

2.2.1. Visi DJP :

“ Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi “.

2.2.2. Misi DJP :

“ menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien “.

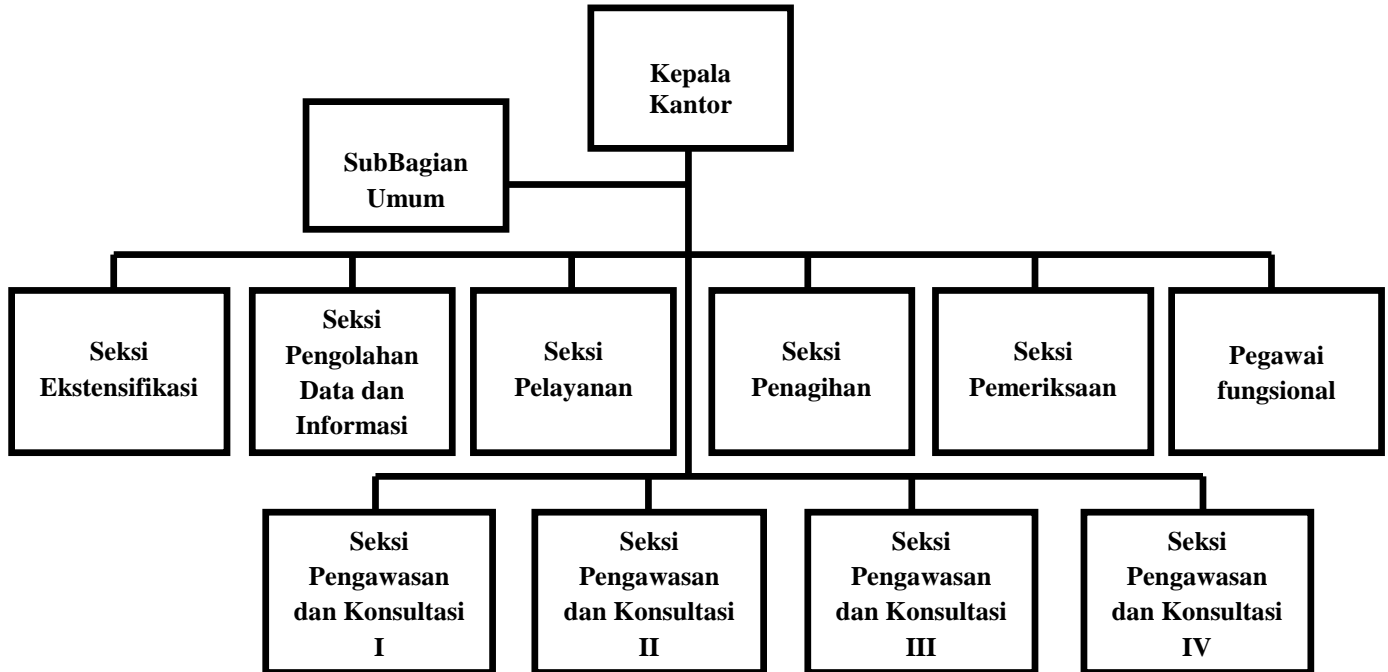
2.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Dumai

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai adalah Struktur Organisasi Lini dan Staf, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Dimana, seluruh Staf atau Pegawai Negeri Sipil RI yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Gamabar II.1

Struktur Oraganisasi KPP Pratama Dumai



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

2.4. Uraian Tugas KPP Pratama Dumai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai mempunyai pembagian unit kerja masing-masing personil antara lain adalah :

1. Kepala Kantor

Sebagai ketua dalam pimpinan secara keseluruhan disemua bidang,memberi motivasi ,kebijaksanaan ,pembinaan ,pengawasan ,dan seluruh seksi agar terciptanya kerja sama yang baik dan terciptanya tujuan.

2. Sub Bagian Umum

mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan ke sekretariat dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

3. Seksi Pengolahan Data Dan Informasi (PDI)

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, administrasian dokumen dan berkas perpajakan, pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

5. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta menyimpan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi (Waskon)

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan, himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, rekonsiliasi data Wp dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Seksi Ekstensifikasi

Mempunyai tugas melaksanakan dan petahusahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan dan menilai objek pajak, serta kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5. Bagian/unit kerja KPP Pratama Dumai

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai terdiri dari :

1. Kepala Kantor : Freddy Hasiholan Sianipar

2. Sub Bagian Umum : Cecep Supriadi

Terbagi 3 sub seksi

a. Bendaharawan : Gusmatiarni

b. Sekretaris : Gandar Brisson Siregar

c. Pelaksana : Novy Dwiyanti

: Ratih Febrianty

: Bobby Kurniawan

: Fauzi Hadi Putra

3. Account Representative : Seno Agung Wahyudi

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Kepala Seksi : Gunawan
Operator Console : Nugroho Adi Prakoso
Pelaksana : Sukmawaty Malinda
: Marusaha Prengky Napitupulu
: Else Nyta Sitohang
: Jones H. Situmeang

5. Seksi Pelayanan

Kepala Seksi : Prameswara Bratha Sanjaya
Pelaksana : Apriyani Sihombing
: Mhd. Jailani
: Azwar Hidayat
: Biondi Pratama Adi Sakti
: A. David Purwarsito
: Andi Sinaga

6. Seksi Penagihan

Kepala seksi : Mhd Yunus
Pelaksana : Nalom Pahotma Ferdinand S
Juru Sita Penagihan : Degi Gema Febrianto

7. Seksi Pemeriksaan

Kepala Seksi : Deden Hikmat Setia
Pelaksana : Kudson Saut Simangunsong

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Kepala Seksi : Astris Mianto

Account Representative : Okta Widayanto
: Josz Hendra Sinaga
: Lasron Lumban Raja
: Auskar Ady Putra
: M. Irzal

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Kepala Seksi : Syaiful Imron
Account Representative : Aprisman
: Harry Sentosa
: Ratih Kurniasari

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Kepala Seksi : Ahmad Mu`Awam
Pelaksana : Sapti Dwi Iryani
Account Representative : Afrizal
: Hedral Heru
: Islaidin Shah
: Sairi

11. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Kepala Seksi : Deden Hikmat Setia
Pelaksana : Muhammad Yudhy Guztaman
: Havidz Ibrahim
: Richo Aji Asmara

12. Fungsional

Pemeriksa Pajak Muda : Surojo Cipto Widodo

Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan : Nur Achmad

: Arya Mahendra

Pemeriksa Pajak Pertama

: Andar Doni Marihot Tampubolon

Pemeriksa Pajak Pelaksana

: Wira Tulada

: Fitra Juniandri

2.6. Wilayah Kerja KPP Pratama Dumai

pada tanggal 27 Mei 2008, Kantor Pelayanan Pajak Dumai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai memiliki wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Kotamadya Dumai
 1. Kec. Bukit Kapur
 2. Kec. Medang Kampai
 3. Kec. Sungai Sembilan
 4. Kec. Dumai Barat
 5. Kec. Dumai Timur
- b. Kabupaten Rokan Hilir
 1. Kec. Tanah Putih
 2. Kec. Pujud
 3. Kec. Tanah Putih Tg Melawan
 4. Kec. Bangko
 5. Kec. Sinaboi
 6. Kec. Kubu
 7. Kec. Pasir Limau Kapas
 8. Kec. Rimba Melintang
 9. Kec. Bangko Pusako
 10. Kec. Bagan Sinembah
 11. Kec. Simpang Kanan

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1. TINJAUAN TEORI

3.1.1. Pengertian Pajak

Pendapat definisi pajak menurut beberapa ahli berbeda-beda, meskipun begitu pendapat tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama tentang pajak. Adapun definisi pajak yang di kemukakan beberapa para ahli di bidang perpajakan antara lain

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitri, SH dalam Mardiasmo (2009:1) Pajak adalah iuran wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. Dr. PJA. Adriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) mengatakan Pajak adalah iuran pada negara yang (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayar nya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum, Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam Waluyo (2011:2).

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa unsur pokok yaitu :

1. Kontribusi wajib kepada negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.1.2. Fungsi Pajak

Dalam Mardiasmo (2009:1) pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

3.1.3. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2009:3) negara mempunyai hak untuk memungut pajak, terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah :

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat di dasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang kepada negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

- c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu :

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang di miliki oleh seseorang.

- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

3.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2009:2) agar pemungutan pajakk tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pemungutan pajak harus adil berarti pajak yang harus di pungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia, pajak di atur dalam UUD 1946 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Pemungutan Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.1.5. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini mengatakan negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini mengatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini mengatakan bahwa pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu negara

3.1.6. sistem pemungutan pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari *official assessment system* yaitu :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *self assessment system* yaitu :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu, Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3.1.7. Sensus Pajak Nasional (SPN)

3.1.7.1. Pengertian Sensus Pajak Nasional (SPN)

Sensus Pajak Nasional (SPN) adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

SPN dilaksanakan dengan tujuan untuk perluasan basis pajak, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh, pemutakhiran data WP. Selain tujuan diatas dalam SPN dilakukan juga pendataan pemilikan NPWP, konsultasi perpajakan, sosialisasi Hak dan Kewajiban wajib pajak,

pengawasan kepatuhan kewajiban wajib pajak. Oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat mendukung program SPN ini, dengan berpartisipasi menyampaikan data dan informasi melalui pengisian Formulir Isian Sensus (FIS). Setiap orang pribadi dan badan usaha yang disensus wajib memberikan keterangan yang benar.

3.1.7.2. Dasar Hukum Sensus Pajak Nasional (SPN)

Dasar hukum pelaksanaan SPN adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu :

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dasar hukum Sensus Pajak Nasional merupakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional. Isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 yaitu :

Pasal 1

1. Sensus Pajak Nasional diselenggarakan melalui kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan.
2. Sensus Pajak Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka meperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara.
3. Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktorat jenderal pajak dan dapat bekerja sama dengan pihak orang lain.

Pasal 2

1. Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak.
2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan.
3. Lokasi subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah domisili, tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan dari subjek pajak.
4. Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Pasal 3

1. Dalam rangka Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan membentuk tim sensus pajak nasional terdiri dari :
 - a. tim pada tingkat pusat.
 - b. tim pada tingkat kantor wilayah; dan
 - c. tim pada tingkat kantor pelayanan pajak.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menggunakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 4

Data perpajakan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan sensus pajak nasional, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pedoman teknis dalam rangka penyelenggaraan sensus pajak nasional diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

3.1.7.3. Subjek Sensus Pajak Nasional (SPN)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional, subjek dalam pelaksanaan SPN yaitu Orang Pribadi dan Badan. Dokumen yang harus dipersiapkan untuk keperluan SPN sebagai berikut :

- a) Untuk subjek sensus Badan, antara lain :
 - 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika subyek sensus Badan adalah PKP
 - 3. Akte Pendirian

4. Nomor Pelanggan PLN
5. SPPT PBB
6. KTP/Paspor/KITAS Penanggung jawab/Pengurus

b) Untuk subyek sensus Orang Pribadi, antara lain :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat Pengukuhan PKP, jika subyek sensus Orang Pribadi adalah PKP
3. KTP/Paspor/KITAS
4. Nomor Pelanggan PLN
5. SPPT PBB

3.1.7.4. Objek Sensus Pajak Nasional (SPN)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional, objek dalam pelaksanaan SPN yaitu :

1. Mendata orang pribadi yang belum mempunyai NPWP, dan akan diberikan NPWP.
2. Mendata wajib pajak yang belum membayar pajak, agar membayar membayar pajaknya.
3. Mendata wajib pajak yang belum menyampaikan SPT, agar menyampaikan SPTnya.
4. Mendata wajib pajak yang memiliki utang pajak, agar dapat melunasi utang pajaknya.
5. Belum optimalnya membayar pajak, agar membayar pajak sesuai ketentuan.

6. SPN akan dilakukan kepada orang pribadi dan badan usaha yang berada di sentra bisnis, high rise building dan kawasan pemukiman.

3.1.7.5. Manfaat Sensus Pajak Nasional (SPN)

Ada beberapa Manfaat dari sensus pajak nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.
2. Mewujudkan keadilan peran serta subyek pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional.
3. Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing.
4. Mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik.
5. Kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

3.1.7.6. Tinjauan Pajak Dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama العُسْرُ (Al-Usyr) atau المَكْسُ (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَضْرِيَّةُ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut الخَرَاجُ (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang -sehingga dapat dipaksakan- dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan suatu kemaksiatan. Memang, pajak termasuk kezhaliman yang nyata. Akan tetapi, kezhaliman yang dilakukan pemimpin tidak membuat ketaatan rakyat kepadanya gugur/batal, bahkan setiap muslim tetap harus taat kepada pemimpinnya yang muslim, selama perintahnya bukan kepada kemaksiatan.

لَا تَأْكُلُوا يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil” [An-Nisa :29].

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerangkan kepada para sahabatnya Radhiyallahu ‘anhum bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zhalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin : “Bolehkah melawan/memberontak?”. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab ; “Tidak boleh! Selagi mereka masih menjalankan shalat”

Bahkan kezhaliman pemimpin terhadap rakyatnya dalam masalah harta telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bagaimana seharusnya rakyat menyikapinya. Dalam sebuah hadits yang shahih, setelah berwasiat kepada kaum muslimin agar selalu taat kepada Allah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpesan kepada kaum muslimin supaya selalu mendengar dan mentaati pemimpin walaupun seandainya pemimpin itu seorang hamba sahaya (selagi dia muslim).

Dijelaskan lagi dalam satu hadits yang panjang, setelah Rasulullah Shallallahu

‘alaihi wa sallam menjelaskan akan datangnya pemimin yang zalim yang berhati setan dan berbadan manusia, Hudzaifah bin Al-Yaman Radhiyallahu ‘anhu bertanya tentang sikap manusia ketika menjumpai pemimpin seperti ini. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab.

إِسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ

“Dengarlah dan patuhlah (pemimpinmu)! Walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu” [HR Muslim kitab Al-Imarah : 1847].

Fadhilatusy Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzahullah memberi alasan yang sangat tepat dalam masalah ini. Beliau mengatakan : “Melawan pemimpin pada saat itu lebih jelek akibatnya daripada sekedar sabar atas kezhaliman mereka. Bersabar atas kezhaliman mereka (memukul dan mengambil harta kita) memang suatu madharat, tetapi melawan mereka jelas lebih besar madharatnya, seperti akan berakibat terpecahnya persatuan kaum muslimin, dan memudahkan kaum kafir menguasai kaum muslimin (yang sedang berpecah dan tidak bersatu).

Diperbolehkannya memungut pajak, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun (Suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

3.2. TINJAUAN PRAKTEK

3.2.1. Data Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

Berdasarkan data jumlah wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, penulis memaparkan data jumlah wajib pajak berdasarkan variabel-variabel yang dikaji selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada yaitu sebelum dan sesudah sensus pajak nasional.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan , meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undang- Undang Perpajakan (pasal 1 ayat 1 undang-undang KUP). Dalam pasal 1 ayat (2) UU KUP, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. Sedangkan bendahara pemerintah adalah pemungut dan memotong pajak yang berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Proses analisis data ditujukan untuk menemukan suatu hasil atau hal yang sebenarnya terdapat di lokasi penelitian, sehingga penulis dapat menarik suatu kesimpulan dari penelitian tersebut.

Tabel III.1.

**Data Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai
dari Tahun 2008 s/d 2012**

Tahun Pajak	2008	2009	2010	2011	2012
Pribadi	21.201	48.306	58.700	60.437	74.068
Badan	5.329	5.718	6.196	6.425	6.502
Bendahara	1.409	1.529	1.637	1.724	1.756
Jumlah Wajib Pajak	27.939	55.553	66.533	68.586	82.326

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

Dari tabel diatas terlihat dalam pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional memiliki dampak besar terhadap pertambahan jumlah wajib pajak dari tahun 2008 s/d 2012 yaitu pada tahun 2008 jumlah wajib pajak sebesar 27.939, di tahun 2009 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak sebesar 27.614, jumlah wajib pajak di tahun 2010 meningkat sebesar 10.980, sedangkan pada tahun 2011 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dengan dimulainya program Sensus Pajak Nasional yaitu sebesar 2.053, dan pada tahun 2012 jumlah wajib pajak meningkat sebesar 13.740. Jadi, hasil keseluruhan data wajib pajak sebelum di terapkan Sensus Pajak Nasional dari tahun 2008 s/d 2009 jumlah wajib pajaknya sebesar 150.025, dan sesudah di

terapkan Sensus Pajak Nasional yang dimulai pada tahun 2011 dan 2012 jumlah wajib pajaknya sebesar 150.912, meningkat sebesar 887 jumlah wajib pajak. melihat kenyataan dari hasil keseluruhan data wajib pajak, bahwa Sensus Pajak Nasional bisa meningkatkan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun.

Sensus Pajak Nasional mempunyai peran penting dalam pertambahan jumlah wajib pajak karena dalam program SPN yaitu Mendata orang pribadi dan badan yang belum mempunyai NPWP, dan akan diberikan NPWP. Dari program SPN masyarakat akan lebih mengerti tentang tata cara perpajakan, karena masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak akan terlibat secara langsung tentang ketentuan perpajakan dan mempunyai rasa nasionalisme terhadap pembangunan di Indonesia.

3.2.2. Mekanisme Sensus Pajak Nasional (SPN)

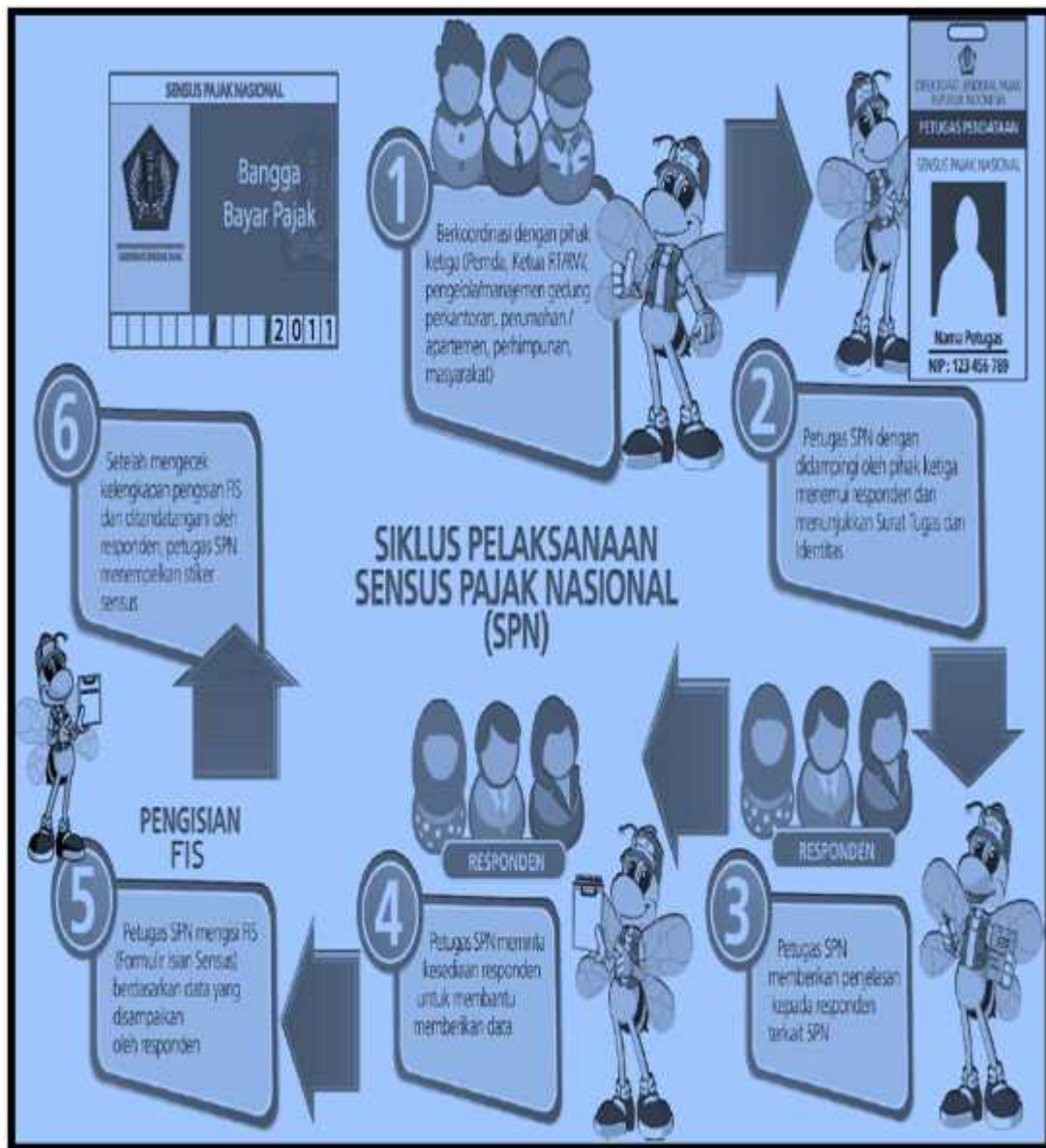
Berdasarkan hukum pelaksanaan SPN adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang mekanisme sensus pajak nasional (SPN) adalah sebagai berikut :

1. Petugas berkoordinasi dengan pihak ketiga (Pemda, ketua RT/RW, pengelola manajemen perkantoran, perumahan/apartemen, perhimpunan dan masyarakat).
2. Petugas SPN dengan di dampingi oleh pihak ketiga menemui responden dan menunjukkan surat tugas dan identitas.

3. Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait SPN.
4. Petugas SPN meminta kesediaan responden untuk membantu memberikan data.
5. Petugas SPN mengisi FIS (formulir isian sensus) berdasarkan data yang di sampaikan oleh responden.
6. Setelah mengecek kelengkapan pengisian FIS dan di tandatangani oleh responden, lalu petugas SPN menempelkan stiker sensus.

Gambar III.1

**MEKANISME SENSUS PAJAK NASIONAL (SPN) PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI**



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

3.2.3. Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)

Dalam proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) pihak-pihak yang terkait pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai adalah :

- a) Kepala dan Pelaksana Seksi eksensifikasi.
- b) Kepala dan Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
- c) Kepala dan Pelaksana Seksi Pengawasan dan konsultasi.
- d) Petugas Sensus Pajak Nasional.
- e) Masyarakat / Wajib Pajak.

3.2.4. Kerahasiaan Data Sensus Pajak Nasional (SPN)

Data yang diberikan oleh subyek sensus kepada petugas SPN bersifat rahasia dan merupakan rahasia jabatan bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Karena jabatannya, seluruh pegawai DJP tidak diperkenankan mengungkapkan data-data Wajib Pajak untuk umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP).

Seluruh data hasil kegiatan SPN akan dimasukkan ke dalam Bank Data DJP sebagai database untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya database perpajakan dilindungi dengan sistem pengaman firewall dan pengaman lainnya. Akses ke dalam database perpajakan selalu dipantau oleh pegawai yang telah terlatih dan berpengalaman untuk melakukan tugas tersebut. Tidak semua pegawai dapat mengakses database perpajakan. Akses hanya diberikan kepada pegawai yang telah mendapatkan otorisasi melalui standard operating procedure (SOP).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan manfaat Sensus Pajak Nasional terhadap peningkatan jumlah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dilaksanakan dengan tujuan untuk perluasan basis pajak, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh, pemutakhiran data wajib pajak.
2. Pelaksanaan sensus pajak nasional yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Dumai sudah sesuai dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 september 2011 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.
3. Dalam penerapan Sensus Pajak Nasional mengalami peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun berikutnya, semakin besar jumlah wajib pajak

maka akan semakin besar pula pendapatan negara dari sektor pajak. Karena pajak merupakan modal untuk pembangunan negara.

4. Sensus Pajak Nasional memiliki manfaat yaitu :
 - a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dimana, dengan memiliki dana yang bersumber dari pajak, pembangunan nasional dapat di terapkan oleh pemerintah semata-amat hanya untuk masyarakat.
 - b) Mewujudkan keadilan peran serta subyek pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional. Sungguh tidak adil apabila ada sebagian masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih banyak lagi masyarakat yang belum membayar pajak.
 - c) Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing. Seperti kita ketahui negara Indonesia memiliki banyak hutang kepada negara luar disinilah peran penting Sensus Pajak Nasional untuk mengurangi ketergantungan dari pinjaman negara luar.
 - d) Mewujudkan pembangunan Nasional lebih baik. Disetiap negara ingin masyarakatnya memiliki sarana dan prasarana yang lebih layak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam segi pendidikan, kesehatan, dan sarana umum untuk meningkatkan kualiatas Sumber Daya Manusia (SDM).
 - e) Kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional sebagai berikut :

1. Untuk kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan cara bersosialisasi pajak bersama masyarakat. Khususnya tentang Sensus Pajak Nasional demi menciptakan masyarakat yang taat pajak.
2. Dalam prosedur Sensus Pajak Nasional petugas seharusnya lebih terbuka dan transparan serta memberikan penyuluhan secara menyeluruh ke daerah Dumai agar masyarakat paham dengan perpajakan.
3. Masyarakat harus lebih terbuka kepada petugas Sensus Pajak Nasional agar data yang diinginkan lebih akurat dan efisien sesuai potensi yang ada pada masyarakat atau Wajib Pajak.
4. Untuk Wajib Pajak hendaknya melunasi kewajiban perpajakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya, agar tidak dikenakan sanksi dan denda perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Tjahjono Dan Triyono, Wahyudi, Perpajakan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Anastasia, Diana Dan Lilis, Setiawati, Perpajakan Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2009

Al Quran, *Surat An-nisa ayat 29*

Billy, Ivan, Tansuria, Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan, Graha Ilmu, Jakarta, 2010

Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta. Edisi Revisi, 2009

Muljono, Djoko, Ketentuan Umum Perpajakan, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2008

Rahayu Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011/ tanggal 12 September 2011 Tentang Sensus Pajak Nasional

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Sony, devano dan siti, kurnia, rahayu, perpajakan konsep, teori, dan isu, kencana, jakarta, 2006

Sony, agustinus dan isnianto kurniawan, panduan praktis perpajakan, andi, yogyakarta, 2009

Purwono, Henry, Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011

www.pajak.go.id 24 februari 2013 pukul 14.00

www.pajak.dalam.islam.com 15 maret 2013 pukul 20.00